

**KEPEMIMPINAN AIRIN RACHMI DIANY DAN H. SYAFRUDDIN DALAM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA TANGERANG
SELATAN DAN KOTA SERANG PADA TAHUN 2019-2021**

Salsabilla Chaerunnisa (email: salsachaerunnisa@gmail.com)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Keberadaan perempuan di sektor-sektor strategis serta sebagai pemimpin seringkali dipertanyakan kualitasnya sedangkan laki-laki tidak. Padahal hadirnya pemimpin perempuan juga dapat membawa perubahan dalam memberikan kebijakan yang jarang mendapat perhatian seperti kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak. Penelitian ini melihat perbedaan gaya kepemimpinan antara Airin Rachmi Diany dan Syafruddin dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan membuat deskripsi-deskripsi dan tema-tema yang berkaitan yang berasal dari data penelitian. Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kepemimpinan Airin dan Syafruddin dalam implementasi Kota Layak Anak. Pada penelitian ini digunakan tiga teori besar yaitu Gaya Kepemimpinan, Kepemimpinan Gender dan Implementasi Kebijakan.

Hasil dari penelitian adalah ditemukan perbedaan kepemimpinan antara Airin dan Syafruddin yang dapat dilihat dari tiga kategori yaitu, dilihat dari gaya kepemimpinan, cara pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kepemimpinan Airin lebih berhasil dalam menjalankan kebijakan yang menyangkut hak anak. Kebijakan yang memperjuangkan hak anak sejatinya sangat penting bagi masa depan bangsa, Indonesia sendiri perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa kepemimpinan gender memiliki hasil yang lebih efektif jika menyangkut tentang isu anak. Oleh karena itu keberadaan pengarusutamaan gender sangat penting guna keberjalanan suatu kebijakan.

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Kepemimpinan Gender, Kota Layak Anak

ABSTRACT

The quality of women's existence in strategic sectors and as leaders is often questioned, while men are not. However, the presence of female leaders can also bring change in providing policies that rarely receive attention, such as policies that support women and children. This research looks at the differences in leadership styles between Airin Rachmi Diany and Syafruddin in implementing the Child Friendly City policy. The method used in this research is a qualitative research method by creating descriptions and related themes derived from research data. This research using a descriptive qualitative approach aims to conduct an analysis of Airin and Syafruddin's leadership in implementing Child Friendly Cities. In this research, three major theories were used, namely Leadership Style, Gender Leadership and Policy Implementation.

The results of the research were found to be differences in leadership between Airin and Syafrudin which could be seen from three categories, namely, in terms of leadership style, way of making decisions and use of resources. This research concludes that Airin's leadership is more successful in implementing policies regarding children's rights. Policies that fight for children's rights are actually very important for the future of the nation. Indonesia itself needs to prepare itself to face the demographic bonus in 2030. Through this research, it was found that gender leadership has more effective results when it comes to children's issues. Therefore, the existence of gender mainstreaming is very important for the success of a policy.

Keywords: Leadership Style, Gender Leadership, Child Friendly City

Dikutip dari pernyataan Rasyid (2007) dalam (Raharjo, 2020) mengenai kepemimpinan menyatakan bahwa kualitas kepemimpinan mengarah pada kemampuan seseorang dalam membangun kesadaran secara kolektif dari suatu komunitas (rakyat) guna mewujudkan tujuan tertentu. Pada dasarnya seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam menggerakkan dan mengayomi seluruh potensi yang dimiliki organisasi, kelompok, bangsa atau negara agar tujuan atau cita-cita dari organisasi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Dalam proses kepemimpinan terdapat beberapa elemen yang menjadi faktor keberhasilan seorang pemimpin, yaitu karakteristik seorang pemimpin, karakteristik pengikut, serta bagaimana situasi terjadinya interaksi pemimpin dan pengikut. Pada dasarnya konsep kepemimpinan merupakan ilmu yang diiringi dengan seni. Lensufiie (2010) dalam (Fitriani & Cenni, 2021) menjelaskan bahwa secara perspektif ilmu, dalam kepemimpinan laki-laki dan perempuan sebenarnya mempunyai kesempatan dan potensi yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Sementara, dilihat dari perspektif seni kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan dinilai memiliki perbedaan.

Adapun perbedaan dari cara laki-laki dan perempuan dalam memimpin dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, karena secara konstruksi laki-laki dan perempuan memang memiliki perbedaan-perbedaan. Perbedaan yang dimaksud di atas adalah berkaitan dengan gaya atau cara yang diterapkan pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Beberapa tahun belakangan banyak penelitian yang membahas mengenai gaya kepemimpinan, terutama pada gaya kepemimpinan perempuan. Hal ini karena permasalahan mengenai gender selalu menjadi isu menarik yang ramai dibahas dikalangan masyarakat yang berakibat pada munculnya stereotip gender. Saat ini perkembangan pemikiran tentang hak-hak perempuan memang terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Fakta tersebut diperkuat dengan semakin banyak perempuan-perempuan yang terjun dalam kancah politik maupun organisasi.

Sejarah partisipasi perempuan di Indonesia dilihat dari pemilihan pertama pada tahun 1955 tercatat 6,5% parlemen diisi oleh perempuan. Keterlibatan perempuan di parlemen sampai dengan Pemilu tahun 1997 masa Orba masih di kisaran 10-13% (Andriliani, Jatnika, & Sutrisno, 2021). Setelah era reformasi keterlibatan perempuan di parlemen mulai

menjadi perhatian ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 65 (1) yang menyebutkan bahwa setiap Partai Politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Implementasi kebijakan afirmasi ini bukan hal mudah, pada Pemilu 2019 kenaikan keterwakilan perempuan di DPR baru sebesar 20,8% atau capaian tertinggi dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya (Kementerian PPPAI, 2021). Indonesia sendiri juga telah mencatat sejarah sebagai salah satu negara yang pernah dipimpin oleh presiden perempuan dengan Megawati Soekarno Poetri sebagai presiden yang menjabat sejak 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Megawati semula adalah wakil presiden lalu menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid yang dimundurkan. Selain itu, sejak Pilkada langsung diterapkan (Juni 2005) mulai bermunculan kepala daerah perempuan meski persentasenya masih terbilang rendah.

Keberadaan perempuan di sektor-sektor strategis serta sebagai pemimpin seringkali dipertanyakan kualitasnya sedangkan laki-laki tidak. Hal ini tidak lain disebabkan oleh stereotip bahwa perempuan lebih banyak memiliki

kelemahan dibanding laki-laki, sehingga kehadiran perempuan dalam dunia politik cenderung masih terbelakang dibanding laki-laki.

Sudah banyak perempuan-perempuan berkualitas dan kompeten yang berhasil terjun dalam dunia politik, mereka bahkan masuk dalam kualifikasi untuk mengisi jabatan-jabatan penting seperti menjadi kepala daerah, menteri, wakil menteri, hingga presiden. Salah satunya adalah Airin Rachmi Diany yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan dalam dua periode dengan masa jabatan 2011-2021.

Selama masa kepemimpinannya sudah banyak prestasi yang diraih Airin salah satunya adalah penghargaan *Indonesian Women Leaders 2018* dalam kategori *Most Powerful in Politics* oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Annisa, 2018). Selain itu selama memimpin Airin juga mampu membawa Kota Tangsel kepada predikat Nindya dalam penghargaan Kota Layak Anak pada tahun 2019. Penghargaan tersebut tentu menjadi pembuktian kapasitas Airin sebagai pemimpin perempuan patut diakui karena sejatinya banyak perempuan di luar sana yang sebenarnya berkompeten dalam dunia politik bahkan menjadi seorang pemimpin, mereka hanya memerlukan kesempatan

untuk mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki tanpa adanya diskriminasi.

Program Kota Layak Anak adalah salah satu program pemerintah dalam mengupayakan dan melindungi hak-hak kesejahteraan anak-anak. Dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara implisit disebutkan bahwa negara memiliki peran sentral dalam memastikan perkembangan anak Indonesia sesuai dengan kalimat pada alinea ke-empat “mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menjaga perdamaian dunia”.

Capaian Kota Tangerang Selatan dapat menjadi bukti bahwa perempuan mampu bersaing dan mampu menunjukkan eksistensinya menjadi seorang pemimpin asal diberikan kesempatan, karena pada dasarnya perempuan juga mampu bersaing dengan laki-laki tentu dengan gaya kepemimpinannya sendiri. Guna melihat perbedaan gaya kepemimpinan gender ini peneliti melihat dari studi kasus implementasi kebijakan Kota Layak Anak di dua kota yang berbeda. Pertama, bagaimana Pemerintah Kota Tangerang Selatan dibawah kepemimpinan Airin dalam mengimplementasikan Program Kota Layak Anak. Kemudian, karaktestik yang kedua adalah kota atau daerah yang sama sekali belum pernah dipimpin oleh perempuan di Banten adalah Kota Serang.

Peneliti memilih Kota Serang karena merupakan Ibu Kota Provinsi Banten dan sebagai salah satu daerah di Banten yang tidak pernah dipimpin oleh seorang perempuan untuk melihat implementasi Program Kota Layak Anak di dua kota yang berbeda.

Dilihat dari kepemimpinan dalam KLA antara Airin dengan Syafruddin sama-sama memulai konsep KLA dari peringkat paling awal di kota masing-masing. Dimana Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang sama-sama mulai mengimplementasikan kebijakan KLA sejak tahun 2011 berdasarkan Peraturan Menteri PPA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Namun, fakta yang terjadi di lapangan keberjalanan KLA di dua kota tersebut mengalami perbedaan. Dimana pada tahun 2021 peringkat KLA Kota Tangerang Selatan sudah berada dikategori Nindya sedangkan Kota Serang masih berada dikategori Pratama. Oleh karena itu masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis kepemimpinan gender dalam implementasi Kota Layak Anak (studi kasus implementasi Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang periode 2019-2021).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu membuat deskripsi-deskripsi dan tema-tema yang berkaitan berasal dari data penelitian. Pada penelitian ini berisi deskripsi atau tema yang mengandung beragam persepektif dari partisipan ataupun gambaran terkait dengan *setting* dan individu-individu.

Menurut Craswell (2007) menjelaskan bahwa narasi dalam pendekatan kualitatif ini akan disajikan dengan model proses, kronologi, kisah yang diperluas, serta analisis berdasarkan kasus ataupun lintas kasus ataupun dengan potret deskriptif yang detail. Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terkait dengan satu ataupun beberapa kasus. Tipe penelitian ini adalah deskriptif karena berusaha menggambarkan objek atau subjek penelitian secara lebih luas dan mendalam. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara aktual, akurat dan terstruktur dengan tujuan untuk dapat menemukan analisis kepemimpinan gender dalam implementasi Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang.

Subjek dalam penelitian ini mencakup Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang periode 2016-2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang Selatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang, Forum Anak dan masyarakat Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang.

Sumber data pada penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung melalui proses observasi atau wawancara terhadap subjek penelitian. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari sumber data lain yang sudah ada sebelum penelitian dan relevan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder meliputi sumber-sumber data yang diperoleh dari media cetak, jurnal, artikel, dll.

Beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung dilapangan atau lokasi penelitian. Melalui observasi ini diharapkan mampu menghasilkan data dengan lengkap dan objektif.
- b. Wawancara secara mendalam terhadap informan yang bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari proses observasi.
- c. Dokumentasi yaitu menghimpun data sekunder baik berupa tulisan, gambar atau

suara yang dapat berguna untuk dokumen penelitian.

- d. Studi Pustaka yaitu melakukan pengumpulan sejumlah buku-buku, jurnal, majalah, sumber elektronik untuk membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis.

Pada bagian analisis dan interpretasi data terbentuk dari beberapa komponen, pada intinya proses ini adalah menganalisa dan memaknai data secara keseluruhan baik berupa teks maupun gambar. Adapun langkah-langkah dalam mengelola data kualitatif menurut Creswell (2012) sebagai berikut:

- a. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dapat dianalisis.
- b. Membaca keseluruhan data, dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat direfleksikan secara keseluruhan.
- c. Menganalisis lebih detail dengan cara meng-*coding* (memaknai data dengan mengolah data menjadi unit-unit kecil terlebih dahulu) data.
- d. Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, tema-tema dan kategori-kategori yang akan dianalisis.
- e. Menyajikan deskripsi tersebut menjadi bentuk narasi atau laporan kualitatif.
- f. Menginterpretasikan atau memaknai data yang dapat dilakukan dengan pendekatan *questioning* (menggunakan pertanyaan-

pertanyaan yang muncul dari data dan analisis) (Creswell, 2012).

HASIL PEMBAHASAN

Selama menjabat sebagai walikota Airin berhasil menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan sebagai Kota Layak Anak. Hal ini terlihat dari upaya Airin dalam mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menggerakkan program-program KLA sehingga terbangun sinergitas yang baik diantara para stakeholder penggerak KLA.

Airin selaku kepala daerah selalu aktif serta memastikan seluruh SKPD yang terlibat dalam KLA menjalin hubungan kerja sama yang baik. Wali kota berkomitmen melaksanakan kebijakan KLA di Kota Tangsel. Komitmen tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 (Perda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Tahun 2018.

Untuk mencapai target tersebut Pemerintah Daerah Kota Tangsel membutuhkan penguatan kelembagaan yang diawali dengan komitmen dari setiap stakeholder yang terlibat dalam KLA. Airin selaku wali kota telah melakukan inisiatif dalam menciptakan komitmen tersebut sejak tahun 2018. Komitmen tersebut guna menciptakan keharmonisan dari setiap OPD bersama-sama bersinergi untuk

menciptakan Kota Tangsel yang layak anak. Perwakilan dari seluruh OPD menandatangani lembar komitmen yang tersedia dan disaksikan langsung oleh Airin selaku wali kota.

Lembar komitmen ini sebagai bentuk penguatan kelembagaan KLA Kota Tangsel yang sebelumnya telah tergambar pada Gugus Tugas KLA melalui Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 463/Kep.75-Huk/2017 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak. Adapun struktur Gugus Tugas KLA Kota Tangsel bukan hanya pimpinan OPD saja yang terlibat melainkan anggota OPD hingga pada tingkat pelaksana teknis turut terlibat dalam pelaksanaan KLA. Sebagai seorang pemimpin Airin memberikan dukungan berupa kepeduliannya kepada seluruh jajarannya atau SKPD agar dapat mencapai target yang sudah dibuat.

Pemimpin laki-laki dan perempuan tentu memiliki orientasi yang berbeda diberbagai kebijakan yang dijalankan. Kepemimpinan Syafruddin dalam implementasi KLA belum mampu memberikan hasil yang maksimal, dimana selama kepemimpinannya Kota Serang hanya mampu berhasil di kategori Pratama untuk KLA ini.

Selama kepemimpinannya Syafrudin memiliki prioritas untuk fokus pada rencana pembangunan infrastruktur di Kota Serang. Dilansir dari Radar Banten

Syafrudin mengatakan bahwa dalam RPJMD pihaknya lebih megutamakan program-program pelayanan dasar yang lebih digenjot untuk diselesaikan hingga akhir masa jabatannya (Muhilmi, 2023). Namun, yang menjadi masalah disini adalah terkait anggaran untuk pembangunan tersebut sebagian besar berasal dari PAD yang bergantung pada iklan rokok. Ini yang menjadi salah satu faktor KLA Kota Serang masih berada dikategori Pratama dan tertinggal dari Kota Tangsel.

Syafruddin dimasa kepemimpinannya memang telah berkomitmen untuk memperjuangkan hak anak. Pemkot Serang bersama wali kota memang mendukung adanya program kebijakan KLA ini ditandai dengan adanya penandatanganan komitmen dalam KLA Kota Serang yang dilaksanakan pada tahun 2022. Namun, sayangnya komitmen ini tidak ditindak lanjuti dengan aksi nyata di lapangan.

Syafruddin sebagai seorang pemimpin belum mampu mengarahkan SKPD yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA Kota Serang yang tercantum pada Keputusan Wali Kota Serang No. 463/Kep.246-Huk/2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas KLA Kota Serang. Sehingga pada saat implementasi KLA di lapangan belum terbentuk

sinergitas yang baik diantara OPD yang terlibat.

Berbeda dengan Airin, Syafruddin belum berhasil menemukan konsep pelaksanaan yang pas terkait dengan KLA ini. Bahkan DP3AKB Kota Serang merasa bekerja sendiri pada saat proses verifikasi pengimputan data untuk laporan evaluasi KLA karena OPD terkait seringkali sulit dihubungi sekedar untuk membahas program atau meminta dokumen pelengkap terkait dengan KLA ini. Apatisnya para OPD dalam pelaksanaan KLA ini juga dapat disimpulkan bahwa selama keberjalanan kepemimpinan Syafruddin di Kota Serang ini kurang memberikan pengawasan dan pendekatan kepada para jajarannya. Program KLA ini seolah tidak menjadi prioritas dari kepemimpinan Syafruddin, dimana komitmen yang sebelumnya sempat dilaksanakan terlihat hanya sebatas pemberian semangat. Sedangkan untuk prosesnya Syafruddin hanya berperan pada saat acara-acara besar saja seperti kehadirannya pada acara Peringatan Hari Anak Nasional, Pelantikan Forum Anak Kota Serang serta pemberian Anugerah KLA oleh Kemen PPPA.

Konsep pelaksanaan KLA di Kota Serang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Kota Tangsel. Perbedaan yang sangat terlihat adalah pada orientasi gaya kepemimpinan antara Airin dan Syafruddin

yang sangat berbeda. Airin sebagai seorang pemimpin terlihat lebih memahami konsep terkait KLA ini sehingga Airin dengan leluasa mengarahkan para jajarannya dan tidak segan untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan pengawasan atau sekedar melakukan komunikasi kebijakan pada OPD terkait.

Sementara Syafruddin merupakan karakter pemimpin yang hanya menyampaikan target KLA dan hanya berfokus pada hasil akhir saja. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tiga gaya kepemimpinan menurut Franklyn (1951) dalam Onong Effendy (1993) yaitu gaya otokratis, demokratis, dan *laissez-faire*, gaya kepemimpinan yang dianut Airin adalah tipe gaya kepemimpinan demokratis sedangkan Syafruddin menganut tipe kepemimpinan kendali bebas. Dan dalam implementasi KLA ini gaya kepemimpinan Airin terlihat lebih efektif untuk memenuhi hak-hak anak yang dikemas dalam kebijakan KLA ini.

Selama kepemimpinannya, Syafruddin juga belum memiliki program unggulan yang berhasil diinisiasi langsung olehnya selaku kepala daerah seperti yang dilakukan Airin dengan program *daycare cimor-nya*. Perbedaan sikap Airin dan Syafruddin dalam pengambilan keputusan pada implementasi KLA ini dapat terlihat dari program prioritas yang sudah mereka

realisasikan. Sebagai seorang ibu yang memiliki anak Airin terlihat lebih peka dan responsif dalam menentukan kebijakan yang menyangkut hak anak. Sementara Syafruddin masih terlihat bingung dalam mengambil keputusan terkait hak anak ini dan lebih memilih fokus untuk merespon hal yang berkaitan dengan isu pembangunan saja. Disini Syafruddin terlihat belum memiliki kepekaan terkait isu anak dan perempuan. Bahkan pengarusutamaan gender juga masih menjadi masalah di Kota Serang, dimana hingga saat ini belum ada perempuan yang berhasil menjabat sebagai Kepala Dinas bahkan pada DP3AKB sekalipun.

Padahal jika dilihat dari hasil pembahasan penelitian serta dari teori Kepemimpinan Gender menurut Deaux & Kite dalam (Dalimoenthe, 2020) yang melihat karakteristik seseorang dari energi maskulin dan feminim memperlihatkan bahwa energi feminim yang dimiliki Airin benar-benar berpengaruh terhadap setiap keputusan yang diambil dalam implementasi KLA ini, namun meskipun demikian sebagai perempuan Airin juga mampu memadukan energi feminimnya dengan energi maskulinnya ketika Airin dengan penuh percaya diri mengobarkan jiwa kompetitif dan sikap tegasnya dalam memimpin Kota Tangsel.

Setiap program kebijakan tentu memerlukan alokasi sumber daya baik

berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang berkaitan dengan materi. Sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2018 Pasal 44 tentang Pendanaan dalam rangka implementasi KLA bersumber dari: a) anggaran pendapatan belanja daerah, b) bantuan pemerintah dan/atau pemerintah provinsi; dan c) sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber daya dalam hal ini tentu berkaitan dengan alokasi anggaran. Anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Kota Tangsel untuk implementasi KLA ini sebagian besar berasal dari APBD. Mengingat PAD Kota Tangsel cukup tinggi dibanding daerah lainnya maka Pemkot Tangsel berhasil memaksimalkan sumber daya yang dimiliki guna menyediakan fasilitas yang ramah anak sehingga klaster penilaian KLA terpenuhi.

Adapun terkait sumber daya manusia pada implementasi KLA di Kota Tangsel ini juga sudah cukup sesuai dan kompeten serta dapat melakukan kerja sama dengan baik. seluruh SDM yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA yang terdiri dari berbagai dinas berhasil mencapai target dalam implementasi KLA di Tangsel. Ketersediaan sumber daya memadai di Kota Tangsel berhasil dimanfaatkan Airin untuk meraih ambisinya dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak. Terlihat dari *output* dan penilaian yang dilakukan oleh PPPA pada implementasi KLA di Kota

Tangsel ini. Sesuai dengan penjelasan Ketua Tim Verifikasi Kementerian PPPA Sri Prihantini Lestari Wijayanti memberikan pernyataan bahwa Tangsel memang memiliki skor tinggi untuk KLA.

Sumber dana yang digunakan dalam implementasi KLA di Kota Serang seluruhnya berasal dari APBD dan untuk jumlah anggarannya diberikan kewenangan kepada OPD terkait yang menjalankan program terkait dengan KLA. Sehingga keberlangsungan dari implementasi kebijakan KLA ini sangat bergantung pada PAD yang diraih oleh Kota Serang.

Berbeda dengan Kota Tangsel, dalam hal ini terdapat masalah utama yang menjadi penghambat Kota Serang dalam mewujudkan kota ramah anak. Masalah tersebut adalah banyaknya iklan rokok ditempat-tempat strategis yang sering dilewati oleh anak-anak dan akan memberikan pengaruh terhadap kondisi psikologis serta masa depan bagi anak-anak di Kota Serang.

Menjamurnya iklan rokok ini juga yang menjadi penyebab KLA Kota Serang terhenti di kategori Pratama selama lima tahun. Hal ini sejalan dengan Kota Serang yang belum sanggup untuk menghapus iklan rokok yang menjadi penghambat utama bagi Kota Serang untuk mewujudkan kota ramah anak.

Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik diantara OPD terkait KLA ini

juga menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Serang kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam mengemban tugasnya di KLA ini. Oleh sebab itu Syafruddin berusaha mengambil inisiatif kembali dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan terkait KHA ini.

Perbedaan ketersediaan sumber daya antara Kota Tangsel dengan Kota Serang memang memiliki pengaruh pada *output* di lapangan. Kota Tangsel memang memiliki PAD jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Serang. Namun, implementasi di lapangan juga bergantung pada program prioritas yang sudah tertera pada RPJMD masing-masing.

PENUTUP

Kesimpulan

Perbedaan gender memberikan pengaruh terhadap gaya kepemimpinan yang dianut oleh seorang pemimpin. Khususnya pada penelitian ini terlihat perbedaan antara gaya kepemimpinan perempuan dan laki-laki dalam implementasi kebijakan yang memperjuangkan hak anak dan perempuan yaitu Kota Layak Anak. Kota Tangerang Selatan yang dipimpin oleh seorang pemimpin perempuan yaitu Airin berada di peringkat lebih tinggi daripada Kota Serang yang dipimpin oleh Syafruddin. Pada era kepemimpinannya Airin berhasil membawa Kota Tangsel mencapai posisi Nindya,

sementara selama memimpin Kota Serang Syafruddin harus puas dengan posisi pratama yaitu berada dua tingkat dibawah Nindya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan perbedaan kepemimpinan antara Airin dan Syafruddin yang dapat dilihat dari tiga kategori yaitu, dilihat dari gaya kepemimpinan, cara pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya.

1. Gaya Kepemimpinan dalam Implementasi Kota Layak Anak

Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap hubungan antara atasan dan bawahan dalam melakukan pekerjaan. Menurut Franklyn (1951) gaya kepemimpinan terbagi menjadi tiga jenis yaitu gaya kepemimpinan autokratis, gaya kepemimpinan demokratis dan gaya kepemimpinan *Laissez-Faire*. Pada implementasi kebijakan KLA ini kedua pemimpin memiliki orientasi gaya kepemimpinan yang berbeda. Airin sebagai pemimpin perempuan cenderung lebih dominan menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Hal ini terlihat dari bagaimana cara Airin membangun hubungan baik dengan para jajarannya, mementingkan kerja sama tim serta rutin membangun komunikasi untuk menanyakan pendapat dan masukan dari para anggota Gugus Tugas KLA. Selama memimpin Airin selalu memastikan bahwa

sinergitas diantara OPD terkait selalu terjalin dengan baik.

Berbeda dengan Airin, gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Syafruddin dalam implementasi KLA ini lebih mengarah pada gaya kepemimpinan *Laissez-Faire*. Selama implementasi KLA berjalan dimasa kepemimpinannya, Syafruddin cenderung memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada para bawahannya terkait hal yang berhubungan dengan KLA ini. Kepemimpinan Syafruddin berorientasi pada hasil akhir dibanding proses pada implementasi KLA. Sehingga selama masa kepemimpinannya para staf dituntut untuk lebih aktif dan mandiri dalam melakukan pengambilan keputusan yang dianggap baik dalam KLA ini.

2. Pengambilan Keputusan dalam Implementasi Kota Layak Anak

Pada proses pengambilan keputusan seorang pemimpin pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Keputusan seorang pemimpin dalam menentukan suatu kebijakan tentu akan memiliki dampak terhadap program-program yang akan dijalankan. Kepemimpinan gender merupakan sebuah bangunan kultural dan sosial yang pada akhirnya melahirkan perbedaan karakteristik maskulin dan feminim (Deaux dan Kite, 1987). Seorang

pemimpin perempuan seringkali identik dengan karakter feminim. Begitu juga pada kepemimpinan Airin dalam implementasi KLA ini, Airin memang terlihat menonjolkan sisi feminimnya dalam proses pengambilan keputusan. Namun, setelah diteliti lebih jauh pada proses pengambilan keputusan Airin berhasil memadukan karakter feminim dan maskulin yang ada pada dirinya. Hal ini terlihat dari sifat mengayomi, responsif seimbang dengan sikap tegas dan ambisiusnya dalam mengambil keputusan terkait KLA ini.

Pada kepemimpinan Syafruddin dalam KLA ini karakter maskulin sangat dominan dalam memberikan pengaruhnya terhadap keputusan yang diambil. Selama memimpin Syafruddin memiliki jiwa kompetitif yang tinggi serta cenderung dingin dan tegas sehingga hubungan dan komunikasi dengan staf menjadi kurang baik. Sebagai seorang laki-laki tentu Syafruddin belum terbiasa dengan isu anak yang biasanya melekat pada perempuan. Sehingga karakter Syafruddin yang jauh dari gender feminim ini agak menyulitkan Syafruddin dalam mengambil keputusan terkait dengan KLA. Sehingga seringkali Syafruddin kurang responsif dalam menanggapi isu-isu terkait anak ini. Hal tersebut menyebabkan langkah beliau dalam mengambil keputusan selalu tertinggal dengan Airin.

3. Penggunaan Sumber Daya dalam Implementasi Kota Layak Anak

Pada implementasi kebijakan 13 public keberhasilan dari suatu kebijakan dapat dilihat melalui pendekatan yang lebih menekankan pada hasil atau *outcome* (Hughes, 1994). Hasil dari implementasi kebijakan publik sendiri sangat berkaitan erat dengan penggunaan sumber daya. Dalam implementasi Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang ini memang terlihat adanya perbedaan program prioritas dari kedua pemimpin sehingga *outcome* yang terlihat di lapangan juga berbeda. Airin sejak awal telah berkomitmen untuk memperjuangkan hak anak dan perempuan dalam masa kepemimpinannya. Hal ini sejalan ketika pada saat memimpin pengarusutamaan gender di Kota Tangerang Selatan sudah mulai terealisasikan salah satunya dengan kehadiran perempuan sebagai Kepala DP3AP2KB Kota Tangsel. Begitu juga dengan ketersediaan fasilitas anak dan mudah untuk diakses oleh seluruh kalangan sudah tersedia di Tangsel. Penggunaan sumber daya yang baik oleh Airin menjadikan *outcome* kebijakan KLA di Kota Tangsel tergolong baik dan sesuai dengan standar yang ada sehingga sejalan dengan penghargaan kategori Nindya yang telah diraih.

Berbeda dengan Kota Serang, selama kepemimpinannya KLA bukan merupakan program prioritas Syafruddin. Hal ini terlihat dari *outcome* kebijakan KLA yang lima tahun berturut-turut masih berada di kategori Pratama. Iklan rokok yang masih banyak ditemukan disepanjang jalan protokol Kota Serang, hingga kurangnya fasilitas taman bermain dan RTH (Ruang Terbuka Hijau) serta APS (Angka Partisipasi Sekolah) yang mengalami penurunan menjadi catatan selama kepemimpinan Syafruddin. Selain itu, komunikasi serta sinergitas yang masih belum terbangun hingga saat ini dalam implementasi KLA menunjukkan adanya masalah terkait SDM pada Gugus Tugas KLA Kota Serang.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Airin lebih berhasil dalam menjalankan kebijakan yang menyangkut hak anak. Kebijakan yang memperjuangkan hak anak sejatinya sangat penting bagi masa depan bangsa, Indonesia sendiri perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa kepemimpinan gender memiliki hasil yang lebih efektif jika menyangkut tentang isu anak. Oleh karena itu keberadaan pengarusutamaan gender

sangat penting guna keberjalanan suatu kebijakan.

Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan gender memberikan pengaruh yang cukup besar pada kebijakan-kebijakan yang kurang mendapatkan perhatian, seperti pada kebijakan yang menyangkut hak anak. Padahal Indonesia sendiri sedang dihadapi dengan ancaman bonus demografi. Lemahnya perhatian terhadap hak anak ini sejalan dengan kurangnya pengarusutamaan gender, karena orientasi antara pemimpin perempuan dan laki-laki dilihat dari ketiga kategori di atas ternyata memiliki perbedaan. Hal ini sejalan dengan perbedaan implementasi kebijakan KLA pada Kota Tangsel yang dipimpin oleh Airin dan Kota Serang yang dipimpin oleh Syafruddin. Oleh karena itu saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Pemerintah Kota untuk mengupayakan keberjalanan kebijakan KLA dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ingin di capai, maka Pemkot perlu memperhatikan pengarusutamaan gender pada struktur birokrasi pemerintahan. Selain itu, wali kota sebagai seorang pemimpin juga perlu untuk melakukan program yang berkaitan

dengan pengembangan manusia, penguatan organisasi demi terwujudnya sinergitas diantara SKPD atau anggota Satuan Gugus Tugas KLA.

2. Bagi masyarakat diharapkan mampu membantu untuk memberikan kontribusinya dalam menyuarkan hak anak dan perempuan. Karena berhasil atau tidaknya seorang pemimpin juga ditentukan oleh sikap masyarakat sebagai penerima kebijakan tersebut.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik serupa dimasa mendatang diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam guna meningkatkan kesetaraan gender sebagai upaya untuk terus memperjuangkan hak anak dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriliani, S. N., Jatnika, A., & Sutrisno, B. (2021). *KEPEMIMPINAN WALIKOTA PEREMPUAN DI KOTA TANGERANG SELATAN PERIODE 2011-2019*. *Janitra (Jurnal Administrasi Pemerintah)*.
- Annisa. (2018, Mei 14). *Airin Raih Penghargaan Indonesia Women Leader 2018*. Retrieved November 22, 2022, from Antaranews.com: <https://banten.antaranews.com/berita/29992/airin-raih-penghargaan-indonesia-women-leader-2018>
- Creswell, J. W. (2012). *Research Desain (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Dalimoenthe, I. (2020). *Sosiologi Gender*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Effendi, Onong Uchjana. (1993). *Human Relations dan Public Relations*. Bandung: Mandar Maju
- Fitriani, A., & Cenni. (2021). *Perempuan dan Kepemimpinan*. *Prosding Webinar Nasional*.
- Hughes, Owen E. (1994). *Public Management ANd Administration, An Introduction, London: Martin Press*
- Kemen PPPAI. (2021, Februari 27). *Menteri Bintang Optimis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen Pada Pemilu 2024*. Retrieved Oktober 16, 2022, from www.kemenpppa.go.id: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3076/menteri-bintang-optimis-keterwakilan-perempuan-di-legislatif-capai-30-persen-pada-pemilu-2024>
- Muhilmi, N. (2023, Oktober 25). *Syafrudin Klaim Pembangunan Kota Serang Sudah Mencapai 97 Persen*. Retrieved from Radar Banten: <https://www.radarbanten.co.id/2023/10/25/syafrudin-klaim-pembangunan-kota-serang-sudah-mencapai-97-persen/>
- Raharjo, M. M. (2020). *Kepemimpinan Kepala Desa*. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara.